



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN DEDIKASI	iii
INTISARI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan	9
1.3 Pertanyaan Penelitian	9
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Motivasi Penelitian	10
1.6 Kontribusi Penelitian	11
1.7 Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Pendapatan Asli Daerah	13
2.1.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah	14
2.1.1.1 Pajak Daerah	15
2.1.1.2 Retribusi Daerah	15
2.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ..	17
2.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	18
2.1.2 Retribusi Jasa Umum	18
2.1.3 Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang	19
2.2 Kewenangan Daerah Kabupaten atau Kota	19
2.3 Pelayanan Publik sebagai Fungsi Utama Pemerintahan	20



2.4 Metrologi dan Metrologi Legal	21
2.4.1 Metrologi di Indonesia	24
2.4.2 Peranan Metrologi Legal dalam Dunia Perdagangan	25
2.4.3 Hubungan Antarorganisasi Metrologi Legal	27
2.5 Tera dan Tera Ulang	29
2.5.1 Aspek Metrologi Legal dalam Pelayanan Tera dan Tera Ulang	31
2.5.2 Tera dan Tera Ulang sebagai Upaya Perlindungan	31
2.5.3 Sumber Daya Manusia Kemetrolgian	34
2.5.4 Pasar Tertib Ukur dan Daerah Tertib Ukur	35
 BAB III DESAIN RISET	
3.1 Objek Penelitian	38
3.2 Gambaran Awal	38
3.3 Metode Penelitian	39
3.3.1 Validitas	41
3.3.2 Reliabilitas	41
3.4 Proses Penelitian	42
3.5 Tahapan Penghitungan Potensi Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang	45
3.5.1 Proses Pengumpulan Data UTTP	45
3.5.2 Proses Penghitungan Potensi Retribusi	45
3.5.3 Proyeksi Potensi Retribusi Tahun Berikutnya	46
 BAB IV ANALISIS DAN DISKUSI	
4.1 Hasil Wawancara	47
4.2 Perolehan Data Meter Listrik (kWh Meter)	53
4.3 Pandangan dan Pendapat Peneliti	53
4.4 Hasil Penghitungan Potensi dan Proyeksi Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang di Kabupaten Lahat	57
4.4.1 Penghitungan Estimasi Biaya Pungut atau Biaya Pelayanan di Luar Kantor untuk Tera dan Tera Ulang Meter Listrik (kWh Meter) di Kabupaten Lahat	59



4.4.2 Penghitungan Estimasi Kebutuhan Penerima	61
4.4.3 Penghitungan Biaya Satuan (<i>Unit Cost</i>) Meter Listrik (kWh Meter) di Kabupaten Lahat	61
4.5 Langkah-Langkah untuk memperoleh Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang bagi Kabupaten Lahat	68

BAB V KONKLUSI DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan	70
5.2 Rekomendasi	70
5.3 Keterbatasan	72

REFERENSI

LAMPIRAN